

ANALISIS PELAKSANAAN PENGAWASAN PEGAWAI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Ni'mah¹, Rudin.M², Muhammad Darma Halwi³

Pascasarjana Manajemen Universitas Abdul Azis Lamadjido Palu Jl.
DR. Suharso, Besusu Barat, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi
Tengah
Email: rudin.ternate@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengawasan pada pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah. (2) Mengetahui dan menganalisis faktor pendukung pelaksanaan pengawasan pada pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah. (3) Mengetahui dan menganalisis faktor penghambat pelaksanaan pengawasan pada pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu (1) Pengumpulan data (2) Reduksi Data (3) Penyajian Data (4) Verifikasi (5) Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan peneliti maka disimpulkan; (1) Pelaksanaan pengawasan pada pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah telah dilaksanakan melalui kegiatan pengamatan, pemeriksaan, dan evaluasi kinerja.

Kata kunci ; Pengawasan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

ABSTRACT

The purpose of this study is to (1) understand and analyze the implementation of supervision of employees at the Population Control and Family Planning Office of Central Sulawesi Province; (2) understand and analyze the supporting factors in the implementation of supervision of employees at the Population Control and Family Planning Office of Central Sulawesi Province; and (3) understand and analyze the inhibiting factors in the implementation of supervision of employees at the Population Control and Family Planning Office of Central Sulawesi Province. This research is qualitative in nature. Data collection was carried out using observation, interviews, and documentation techniques. The data analysis techniques used are (1) Data Collection, (2) Data Reduction, (3) Data Presentation, (4) Verification, and (5) Conclusion. Based on the results of the research and analysis conducted by the researcher, it is concluded that (1) the implementation of supervision of employees at the Population Control and Family Planning Office of Central Sulawesi Province has been carried out through the activities of Observation, inspection, and performance evaluation.

Keywords: *Supervision, Population Control, and Family Planning.*

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel merupakan tuntutan utama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu unsur penting dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik adalah keberadaan aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, berintegritas, serta memiliki kinerja yang optimal. Aparatur sipil negara sebagai pelaksana kebijakan publik memiliki peran strategis dalam menjalankan roda pemerintahan, melaksanakan program pembangunan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas kinerja ASN menjadi fokus utama dalam reformasi birokrasi di Indonesia.¹

¹ Miftah Thoha, 2005, *Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia* Kencana, Jakarta.

Dalam konteks manajemen pemerintahan, pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting, selain perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Pengawasan berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana, peraturan perundang-undangan, serta tujuan yang telah ditetapkan. Melalui pengawasan, pimpinan dapat mengendalikan pelaksanaan tugas pegawai, mencegah terjadinya penyimpangan, serta melakukan tindakan korektif apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan. Dengan demikian, pengawasan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi pemerintahan.²

Pelaksanaan pengawasan terhadap pegawai di lingkungan instansi pemerintah menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Masyarakat tidak hanya menuntut pelayanan yang cepat dan tepat, tetapi juga pelayanan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik-praktik maladministrasi. Kondisi ini menuntut setiap instansi pemerintah untuk memiliki sistem pengawasan internal yang kuat dan efektif, sehingga mampu memastikan bahwa pegawai bekerja sesuai dengan standar pelayanan dan etika birokrasi yang berlaku.³

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di bidang kependudukan dan keluarga

² Husnawati 2012, Pelaksanaan Pengawasan Camat Terhadap Aparat Pemerintah di Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara. Skripsi Fisip Unismuh Palu

³ Anrie Wiryawan, 2014, Pelaksanaan Pengawasan Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Terhadap Aparatur Pemerintah Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

berencana. Dinas ini bertanggung jawab dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta koordinasi lintas sektor dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan program-program tersebut sangat bergantung pada kinerja pegawai yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah memiliki karakteristik yang cukup kompleks. Selain melaksanakan tugas administratif di kantor, pegawai juga dituntut untuk melaksanakan kegiatan operasional di lapangan, seperti penyuluhan keluarga berencana, pendampingan keluarga, pengumpulan dan pengelolaan data kependudukan, serta koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan instansi terkait lainnya. Kondisi ini memerlukan tingkat disiplin, tanggung jawab, dan profesionalisme yang tinggi dari seluruh pegawai.

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan tugas pegawai tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Masih terdapat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kedisiplinan pegawai, seperti ketepatan waktu kehadiran, kepatuhan terhadap jam kerja, serta konsistensi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Selain itu, perbedaan latar belakang pendidikan, kompetensi, dan pengalaman kerja pegawai juga memengaruhi kualitas pelaksanaan tugas. Kondisi tersebut menuntut adanya pengawasan yang efektif agar setiap pegawai dapat bekerja sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya.

Pengawasan pada pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah tidak hanya

berfungsi sebagai alat kontrol untuk menilai kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan kerja, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan peningkatan kinerja. Pengawasan yang dilaksanakan secara berkesinambungan melalui pengamatan, pemeriksaan, dan evaluasi kinerja diharapkan mampu memberikan umpan balik yang konstruktif bagi pegawai. Dengan adanya umpan balik tersebut, pegawai dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga dapat melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Meskipun pengawasan telah menjadi bagian dari sistem manajemen pemerintahan, dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai kendala. Kendala tersebut dapat berasal dari faktor internal organisasi, seperti keterbatasan sumber daya manusia pengawas, lemahnya sistem dan mekanisme pengawasan, serta kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pengawasan. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana kerja juga dapat memengaruhi efektivitas pengawasan, khususnya dalam pengawasan kegiatan lapangan yang memerlukan dukungan fasilitas operasional yang memadai.⁴

Di sisi lain, faktor eksternal seperti kondisi geografis wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang cukup luas dan memiliki karakteristik wilayah yang beragam juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan. Jarak antarwilayah, keterbatasan akses transportasi, serta perbedaan kondisi sosial dan budaya masyarakat dapat memengaruhi intensitas dan efektivitas pengawasan terhadap kegiatan pegawai di lapangan.

⁴ Fabanyo, 2011. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Di Inspektorat Daerah Kota Tidore Kepulauan, . Unhas, Makassar.

Kondisi ini menuntut adanya strategi pengawasan yang adaptif dan inovatif agar pengawasan tetap dapat dilaksanakan secara optimal.⁵

Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan pada pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah perlu dikaji secara lebih mendalam dan komprehensif. Penelitian mengenai pelaksanaan pengawasan pada pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah menjadi penting dan relevan untuk dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang dikemukakan di atas, maka masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu ;

- 1) Bagaimana pelaksanaan pengawasan pada pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah?
- 2) Bagaimana faktor pendukung pelaksanaan pengawasan pada pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, di mana mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk

⁵ M Rudin, MLF Bakarbesy, F Fadlun, 2024, Strategi Manajemen Pengembangan Usaha. Mikro dan Kecil Olahan Pangan di Kabupaten Morowali Utara Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo

meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif analitik. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya (tidak ditransformasi dalam bentuk angka).⁶

Untuk membatasi daerah penelitian agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan efisien dan efektif, maka penetapan lokasi penelitian merupakan hal yang cukup penting, oleh karenanya dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Agustus-Oktober 2025

D. PEMBAHASAN

Sejarah Berdirinya Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah

Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana merupakan salah satu aspek strategis dalam pembangunan nasional dan daerah. Dinamika pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah sejak awal kemerdekaan telah menaruh perhatian besar terhadap upaya pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas keluarga. Di Provinsi Sulawesi Tengah, komitmen tersebut diwujudkan

⁶ Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

melalui pembentukan dan pengembangan kelembagaan yang kini dikenal sebagai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Provinsi Sulawesi Tengah.

Sejarah berdirinya DP2KB Provinsi Sulawesi Tengah tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang kebijakan kependudukan dan keluarga berencana di Indonesia. Pada masa awal Orde Baru, pemerintah pusat mulai secara sistematis menggalakkan Program Keluarga Berencana (KB) sebagai upaya menekan laju pertumbuhan penduduk. Program ini dikoordinasikan secara nasional oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang dibentuk pada tahun 1970. Sejak saat itu, program KB mulai dilaksanakan hingga ke daerah-daerah, termasuk di wilayah Sulawesi Tengah.

Pada awal pelaksanaannya di Sulawesi Tengah, kegiatan keluarga berencana masih bersifat sektoral dan terkoordinasi melalui unit-unit kerja yang berada di bawah struktur pemerintahan daerah serta perwakilan BKKBN di daerah. Fokus utama saat itu adalah memperkenalkan konsep keluarga kecil bahagia dan sejahtera, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan kelahiran, serta menyediakan pelayanan kontrasepsi bagi pasangan usia subur.

Seiring dengan berkembangnya program dan meningkatnya kebutuhan masyarakat, kelembagaan yang menangani urusan keluarga berencana di daerah terus mengalami penyesuaian. Pada masa sebelum era otonomi daerah, pelaksanaan program KB di Provinsi Sulawesi Tengah sebagian besar berada di bawah kendali pemerintah pusat melalui perwakilan BKKBN, sementara

pemerintah daerah berperan sebagai pendukung dalam aspek operasional dan koordinasi lintas sektor.⁷

Perubahan signifikan terjadi setelah diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah pada awal tahun 2000-an. Melalui kebijakan ini, sebagian besar urusan pemerintahan, termasuk urusan kependudukan dan keluarga berencana, diserahkan kepada pemerintah daerah. Konsekuensinya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dituntut untuk membentuk perangkat daerah yang secara khusus menangani pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Di Provinsi Sulawesi Tengah, kebijakan otonomi daerah mendorong pembentukan organisasi perangkat daerah yang lebih mandiri dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Urusan keluarga berencana yang sebelumnya melekat pada instansi tertentu kemudian dikembangkan menjadi lembaga tersendiri atau digabung dengan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sesuai dengan kebijakan dan kondisi daerah. Penyesuaian struktur organisasi ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program serta memperkuat koordinasi lintas sektor.

Sejalan dengan perkembangan kebijakan nasional di bidang kependudukan, pemerintah menegaskan bahwa program keluarga berencana tidak hanya bertujuan mengendalikan jumlah penduduk, tetapi juga meningkatkan kualitas penduduk. Paradigma baru ini menempatkan keluarga sebagai pusat pembangunan, dengan penekanan pada pembentukan keluarga yang sehat, berpendidikan, berdaya, dan sejahtera. Oleh karena

⁷ Situmorang, M, Viktor, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, PT Rineka Cipta Jakarta.

itu, ruang lingkup tugas kelembagaan keluarga berencana di daerah pun semakin luas, mencakup pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, serta pembangunan keluarga.

Pembentukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah merupakan bagian dari penataan organisasi perangkat daerah yang mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah dan pembagian urusan pemerintahan. Dinas ini dibentuk sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan provinsi.

Dengan terbentuknya DP2KB Provinsi Sulawesi Tengah, pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana di tingkat provinsi menjadi lebih terarah dan terintegrasi. Dinas ini memiliki tugas pokok merumuskan kebijakan daerah, melaksanakan koordinasi, pembinaan, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di kabupaten dan kota. Selain itu, dinas juga berperan dalam pengumpulan dan pengolahan data kependudukan, penyusunan perencanaan program, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Dalam perjalanannya, DP2KB Provinsi Sulawesi Tengah terus beradaptasi dengan berbagai perubahan kebijakan nasional dan tantangan pembangunan daerah. Isu-isu seperti bonus demografi, penurunan angka kelahiran, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga menjadi fokus utama program dan kegiatan dinas. Pendekatan yang digunakan pun semakin

komprehensif, tidak hanya melalui pelayanan kontrasepsi, tetapi juga melalui edukasi, advokasi, dan pemberdayaan masyarakat.

1. Analisis Pelaksanaan Pengawasan pada Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting dalam penyelenggaraan organisasi pemerintahan. Melalui pengawasan, pimpinan dapat memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai berjalan sesuai dengan rencana, peraturan, dan tujuan organisasi. Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Provinsi Sulawesi Tengah, pengawasan memiliki peran strategis untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pengawasan di lingkungan DP2KB dilakukan melalui beberapa bentuk operasional, antara lain pengamatan, pemeriksaan, dan evaluasi.⁸

a. Operasional Pengawasan melalui Pengamatan

Pengamatan merupakan bentuk pengawasan awal yang dilakukan secara langsung dan berkesinambungan terhadap aktivitas pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Di DP2KB Provinsi Sulawesi Tengah, pengawasan melalui pengamatan dilakukan oleh pimpinan unit kerja, kepala bidang, maupun kepala seksi terhadap pegawai di bawah tanggung jawabnya. Pengamatan ini mencakup kedisiplinan kerja, kehadiran pegawai, kepatuhan terhadap jam kerja, serta sikap dan

⁸ Sule Erni Trisnawati, dan Kurniawan Saefullah, 2005, *Pengantar Manajemen*, Edisi Pertama, cetakan pertama, Prenada Media, Jakarta

perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pengamatan juga dilakukan terhadap pelaksanaan tugas teknis, seperti kegiatan penyuluhan keluarga berencana, pengelolaan data kependudukan, serta koordinasi dengan instansi terkait. Melalui pengamatan langsung, pimpinan dapat mengetahui sejauh mana pegawai memahami tugasnya dan mampu menjalankannya sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Selain itu, pengamatan memungkinkan pimpinan untuk mendeteksi secara dini adanya penyimpangan, kendala, atau permasalahan yang dihadapi pegawai di lapangan.

Pengawasan melalui pengamatan tidak hanya bersifat mencari kesalahan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pembinaan. Dengan pengamatan yang dilakukan secara objektif dan berkesinambungan, pimpinan dapat memberikan arahan, motivasi, serta solusi atas permasalahan yang dihadapi pegawai. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai sekaligus menciptakan suasana kerja yang kondusif di lingkungan DP2KB Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Operasional Pengawasan melalui Pemeriksaan

Selain pengamatan, pelaksanaan pengawasan pada DP2KB Provinsi Sulawesi Tengah juga dilakukan melalui pemeriksaan. Pemeriksaan merupakan kegiatan pengawasan yang lebih formal dan sistematis, yang bertujuan untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan peraturan, rencana kerja, serta target yang telah ditetapkan. Pemeriksaan dapat dilakukan secara

berkala maupun insidental, tergantung pada kebutuhan dan kebijakan pimpinan.⁹

Pemeriksaan mencakup aspek administrasi, keuangan, dan pelaksanaan program kerja. Dalam aspek administrasi, pemeriksaan dilakukan terhadap kelengkapan dokumen, laporan kegiatan, surat-menyurat, serta pengarsipan data. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan tercatat dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam aspek keuangan, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan, efisien, dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada aspek pelaksanaan program, pemeriksaan difokuskan pada pencapaian target kegiatan, seperti realisasi program keluarga berencana, pengendalian penduduk, serta kegiatan penyuluhan dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui pemeriksaan ini, pimpinan dapat menilai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja pegawai, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pencapaian tujuan organisasi.

Hasil pemeriksaan biasanya dituangkan dalam bentuk laporan yang memuat temuan, analisis, serta rekomendasi perbaikan. Laporan ini menjadi dasar bagi pimpinan untuk mengambil langkah-langkah korektif, baik dalam bentuk pembinaan, penegakan disiplin, maupun perbaikan sistem kerja. Dengan demikian, pemeriksaan berperan penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi kinerja pegawai di DP2KB Provinsi Sulawesi Tengah.

⁹ Situmorang, M, Viktor, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, PT Rineka Cipta Jakarta.

c. Operasional Pengawasan melalui Evaluasi

Evaluasi merupakan tahapan pengawasan yang dilakukan untuk menilai secara menyeluruh hasil pelaksanaan kegiatan dan kinerja pegawai dalam periode tertentu. Di DP2KB Provinsi Sulawesi Tengah, evaluasi biasanya dilakukan secara periodik, seperti evaluasi bulanan, triwulanan, atau tahunan. Evaluasi ini bertujuan untuk membandingkan antara rencana kerja dengan hasil yang telah dicapai, serta menilai dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

Evaluasi kinerja pegawai mencakup penilaian terhadap kualitas kerja, kuantitas hasil kerja, ketepatan waktu, serta kemampuan pegawai dalam bekerja sama dan berinovasi. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap efektivitas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas, khususnya dalam mendukung pencapaian tujuan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Provinsi Sulawesi Tengah.

Melalui evaluasi, pimpinan dapat memperoleh gambaran yang objektif mengenai keberhasilan maupun kelemahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk perencanaan kegiatan selanjutnya, penyempurnaan kebijakan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Evaluasi juga menjadi sarana umpan balik bagi pegawai, sehingga mereka dapat mengetahui tingkat pencapaian kinerjanya dan termotivasi untuk melakukan perbaikan di masa mendatang.¹⁰

Pendapat Peneliti ;

Secara keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ; Pelaksanaan pengawasan pada pegawai Dinas Pengendalian

¹⁰ Miftah Thoha, 2005, *Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia* Kencana, Jakarta.

Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan melalui operasional pengamatan, pemeriksaan, dan evaluasi yang saling melengkapi. Pengamatan berfungsi sebagai pengawasan langsung dan pembinaan, pemeriksaan memastikan kepatuhan terhadap aturan dan akuntabilitas kerja, sedangkan evaluasi menilai efektivitas kinerja dan pencapaian tujuan organisasi. Dengan pelaksanaan pengawasan yang efektif dan berkesinambungan, diharapkan kinerja pegawai DP2KB Provinsi Sulawesi Tengah dapat terus meningkat, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal dan tujuan pembangunan kependudukan dapat tercapai secara berkelanjutan.

2. Pembahasan Faktor Pendukung Pelaksanaan Pengawasan Pada Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang berperan penting dalam menjamin terlaksananya tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien. Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Provinsi Sulawesi Tengah, pengawasan terhadap pegawai menjadi aspek strategis dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Keberhasilan pengawasan tidak hanya ditentukan oleh sistem yang diterapkan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung yang saling berkaitan. Faktor-faktor pendukung tersebut berkontribusi dalam menciptakan pengawasan yang optimal, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kinerja pegawai.¹¹

¹¹ Tjandara.Riawan W. 2008.*Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*. Pembaharuan.Yogyakarta

a. Komitmen dan Peran Pimpinan

Salah satu faktor pendukung utama dalam pelaksanaan pengawasan pada DP2KB Provinsi Sulawesi Tengah adalah adanya komitmen dan peran aktif pimpinan. Pimpinan memiliki posisi strategis dalam mengarahkan, mengendalikan, dan membina pegawai agar bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komitmen pimpinan tercermin dari keterlibatan langsung dalam proses pengawasan, baik melalui pengamatan langsung, rapat koordinasi, maupun evaluasi kinerja secara berkala. Pimpinan yang memiliki integritas dan keteladanan akan menjadi contoh bagi pegawai dalam menjalankan tugas dengan disiplin dan tanggung jawab. Dengan adanya keteladanan tersebut, pengawasan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga membangun kesadaran pegawai untuk bekerja secara profesional. Selain itu, pimpinan yang responsif terhadap permasalahan yang muncul di lapangan dapat segera mengambil langkah korektif, sehingga penyimpangan dapat diminimalisir sejak dini.

b. Ketersediaan Aturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Faktor pendukung lainnya adalah tersedianya aturan kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas. Di DP2KB Provinsi Sulawesi Tengah, SOP menjadi pedoman bagi pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing. Dengan adanya SOP, pelaksanaan pengawasan menjadi lebih terarah karena terdapat standar yang dapat dijadikan tolok ukur dalam menilai kinerja pegawai.

Aturan dan SOP juga membantu pegawai memahami batasan kewenangan, tanggung jawab, serta prosedur kerja yang harus diikuti. Hal ini memudahkan pimpinan dalam melakukan pengawasan, karena setiap penyimpangan dapat diidentifikasi

berdasarkan ketidaksesuaian dengan aturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, keberadaan SOP mendukung terciptanya pengawasan yang objektif, transparan, dan adil.¹²

c. Kualitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor pendukung penting dalam pelaksanaan pengawasan. Pegawai DP2KB Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai cenderung lebih mudah diawasi karena memahami tugas dan tanggung jawabnya. Pemahaman yang baik terhadap regulasi, prosedur kerja, serta tujuan organisasi akan mendorong pegawai untuk bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.¹³

Selain itu, kompetensi pengawas juga berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan. Pimpinan dan pejabat struktural yang memiliki kemampuan manajerial dan pengawasan yang baik akan mampu melaksanakan fungsi pengawasan secara profesional. Pelatihan dan pengembangan SDM, baik melalui pendidikan formal maupun kegiatan peningkatan kapasitas, menjadi faktor pendukung yang memperkuat pelaksanaan pengawasan di lingkungan DP2KB.

d. Sistem Administrasi dan Pelaporan yang Tertata

Sistem administrasi dan pelaporan yang tertata dengan baik juga menjadi faktor pendukung penting dalam pengawasan. Di DP2KB Provinsi Sulawesi Tengah, laporan kegiatan, laporan kehadiran, serta laporan capaian kinerja menjadi instrumen utama dalam proses pengawasan. Melalui laporan tersebut,

¹² Sutrisno, Edy, 2019, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Kencana, Jakarta.

¹³ Silalahi Ulbert, 2002. *Studi Tentang Ilmu Administrasi (Konsep, Teori dan Dimensi)*. Sinar Baru Algesindo. Bandung.

pimpinan dapat memantau perkembangan pelaksanaan tugas pegawai secara berkala.¹⁴

Administrasi yang tertib memudahkan proses pemeriksaan dan evaluasi, karena data dan dokumen yang dibutuhkan tersedia secara lengkap dan akurat. Dengan demikian, pengawasan dapat dilakukan secara sistematis dan berbasis data, bukan hanya berdasarkan penilaian subjektif. Sistem pelaporan yang baik juga meningkatkan akuntabilitas pegawai, karena setiap kegiatan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

e. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan faktor pendukung yang semakin penting dalam pelaksanaan pengawasan. Penggunaan sistem informasi kepegawaian, aplikasi absensi elektronik, serta sistem pelaporan berbasis digital membantu DP2KB Provinsi Sulawesi Tengah dalam memantau kinerja dan disiplin pegawai secara lebih efektif.

Dengan adanya teknologi informasi, proses pengawasan menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan. Pimpinan dapat mengakses data kinerja pegawai secara real time, sehingga memudahkan pengambilan keputusan. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga mengurangi potensi manipulasi data dan meningkatkan efisiensi kerja. Hal ini sangat mendukung pelaksanaan pengawasan yang objektif dan berkelanjutan.

f. Budaya Kerja dan Disiplin Pegawai

Budaya kerja yang positif dan tingkat disiplin pegawai yang tinggi merupakan faktor pendukung penting dalam pelaksanaan pengawasan. Di lingkungan DP2KB Provinsi Sulawesi Tengah, budaya kerja yang menekankan pada tanggung jawab, kerja sama,

¹⁴ Musanef, 1996, *Manajemen Kepegawaian Indonesia*, Gunung Agung. Jakarta

dan pelayanan publik akan mempermudah proses pengawasan. Pegawai yang memiliki kesadaran disiplin cenderung mematuhi aturan tanpa harus selalu diawasi secara ketat.

Budaya kerja yang baik juga menciptakan iklim kerja yang kondusif, di mana pengawasan dipandang sebagai upaya pembinaan dan peningkatan kinerja, bukan sebagai bentuk tekanan. Dengan demikian, pengawasan dapat berjalan secara lebih efektif karena didukung oleh sikap dan perilaku pegawai yang positif.

g. Koordinasi dan Komunikasi Internal yang Baik

Koordinasi dan komunikasi internal yang efektif menjadi faktor pendukung lainnya dalam pelaksanaan pengawasan. Hubungan kerja yang harmonis antara pimpinan dan pegawai, serta antarbidang di DP2KB Provinsi Sulawesi Tengah, memudahkan penyampaian informasi terkait kebijakan, arahan, dan hasil pengawasan.¹⁵

Komunikasi yang terbuka memungkinkan pegawai untuk menyampaikan kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas. Dengan adanya komunikasi yang baik, pimpinan dapat memahami kondisi di lapangan dan menyesuaikan bentuk pengawasan yang diterapkan. Hal ini mendukung terciptanya pengawasan yang bersifat solutif dan partisipatif.

h. Dukungan Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana kerja juga menjadi faktor pendukung pelaksanaan pengawasan. Fasilitas kerja yang memadai, seperti ruang kerja, perangkat teknologi, serta kendaraan operasional, membantu pegawai dalam melaksanakan

¹⁵ Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

tugasnya dengan baik. Sarana dan prasarana yang memadai juga memudahkan pimpinan dalam melakukan pengawasan langsung ke lapangan.¹⁶

Dukungan fasilitas ini memungkinkan pelaksanaan pengawasan yang lebih menyeluruh, khususnya terhadap kegiatan yang dilakukan di luar kantor. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mencakup pelaksanaan tugas di lapangan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Aulia Rahma (2016), dengan judul Pengawasan Camat Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong, yang menyimpulkan bahwa camat dalam melakukan pengawasan dalam meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai pada kantor Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Mautong, sudah cukup baik jika dilihat dari beberapa indikator : Menetapkan Standar Tujuan, Membandingkan hasil, dan Mengambil langkah perbaikan yang diperlukan.

Pendapat Penelti ;

Berdasarkan uraian di atas, dapat peneliti berpendapat bahwa pelaksanaan pengawasan pada pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut meliputi komitmen pimpinan, ketersediaan aturan dan SOP, kualitas sumber daya manusia, sistem administrasi dan pelaporan, pemanfaatan teknologi informasi, budaya kerja dan disiplin pegawai, koordinasi dan komunikasi internal, serta dukungan sarana dan prasarana. Dengan adanya faktor-faktor pendukung tersebut, pelaksanaan pengawasan dapat berjalan

¹⁶ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

secara efektif dan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pegawai serta keberhasilan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Provinsi Sulawesi Tengah.

E. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pengawasan pada pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah telah dilaksanakan melalui kegiatan pengamatan, pemeriksaan, dan evaluasi kinerja. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan pegawai melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan, standar operasional prosedur, serta rencana kerja yang telah ditetapkan. Meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal akibat beberapa kendala, pengawasan tetap berperan penting dalam meningkatkan disiplin, tanggung jawab, dan kinerja pegawai. Dengan penguatan sistem pengawasan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai, pelaksanaan pengawasan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.
2. Pelaksanaan pengawasan pada pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan dengan cukup baik karena didukung oleh berbagai faktor yang saling melengkapi. Pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pegawai, tetapi juga sebagai sarana pembinaan untuk meningkatkan disiplin, tanggung jawab, dan kinerja aparatur. Peran aktif pimpinan dalam mengarahkan dan membina pegawai, didukung oleh

keberadaan aturan serta Standar Operasional Prosedur yang jelas, menjadi landasan utama dalam pelaksanaan pengawasan. Selain itu, kualitas sumber daya manusia yang memadai, sistem administrasi dan pelaporan yang tertata, serta pemanfaatan teknologi informasi turut mempermudah proses pengawasan dan evaluasi kinerja. Budaya kerja yang cukup baik, komunikasi internal yang efektif, serta dukungan sarana dan prasarana kerja juga berkontribusi dalam menciptakan pengawasan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan adanya faktor-faktor pendukung tersebut, pelaksanaan pengawasan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan mampu terus ditingkatkan guna mendukung pencapaian tujuan organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

F. SARAN

Saran operasional pelaksanaan pengawasan pegawai pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah yang bersifat praktis dan bisa langsung diterapkan:

1. Penerapan pengawasan berbasis kinerja dan kehadiran secara digital yaitu Mengoptimalkan penggunaan sistem absensi elektronik dan laporan kinerja harian/mingguan untuk memantau disiplin kerja pegawai. Data kehadiran dan capaian tugas dijadikan dasar evaluasi rutin oleh pimpinan bidang, sehingga pengawasan lebih objektif, transparan, dan berkelanjutan.
2. Penguatan peran atasan langsung melalui monitoring dan evaluasi berkala yaitu; Atasan langsung diwajibkan

melakukan pengawasan aktif melalui apel rutin, rapat evaluasi bulanan, serta pembinaan langsung kepada pegawai. Hasil monitoring dan evaluasi didokumentasikan sebagai bahan tindak lanjut, baik dalam bentuk pembinaan, penghargaan, maupun pemberian sanksi sesuai ketentuan.

DAFTAR RUJUKAN

A. Buku

- Fathoni Abdurrahmat, 2006, *Organisasi dan Manajemen*, cetakan pertama, Rineka Cipta, Jakarta.
- Manullang, M, 2008, *Dasar-Dasar Manajemen*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Miftah Thoha, 2005, *Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia* Kencana, Jakarta.
- Moleong, Lexy, J, 2012, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Musanef , 1996, *Manajemen Kepegawaian Indonesia*, Gunung Agung. Jakarta.
- Nawawi, H, 1995, *Pengawasan di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Erlangga, Jakarta.
- Ndraha, T. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. PT. Rineka cipta. Jakarta.
- Siagian, P, Sondang. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Silalahi Ulbert, 2002. *Studi Tentang Ilmu Administrasi (Konsep, Teori dan Dimensi)*. Sinar Baru Algesindo. Bandung.
- Situmorang, M, Viktor, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, PT Rineka Cipta Jakarta.

- Siswandi dan Indra Iman, 2009, *Aplikasi Manajemen Perusahaan*, edisi kedua, Mitra Wicana Media, Jakarta.
- Soekidjo, N. (1997), *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan dalam Ilmu Kesehatan . Masyarakat*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* .Bandung:Alfabeta
- Suharto, 1988, *Pelengkap Pengawasan*, Dharma Bhakti, Jakarta.
- Suhudy, Idup. 2000, *Kebijaksanaan Pendayagunaan Aparatur Negara*. Lembaga Administrasi Negara RI. Jakarta.
- Sugiyono.2010,*Metode Penelitian Administrasi Negara*. CV Alfabeta. Bandung.
- Sule Erni Trisnawati, dan Kurniawan Saefullah, 2005, *Pengantar Manajemen*, Edisi Pertama, cetakan pertama, Prenada Media, Jakarta
- Sutrisno, Edy, 2019, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Kencana, Jakarta.
- Terry, George R. Asas-Asas Manajemen. Penerjemah: Winardi. Bandung: PT. Alumni. 1986
- Tjandara.Riawan W. 2008.*Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*. Pembaharuan.Yogyakarta.
- Victor, M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan*, Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Widjaja, A.W., 2006, *Administrasi Kepegawaian*, Rajawali. Jakarta.

B. Dokumen

UUD RI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

C. Sumber Lain

Anrie Wiryawan, 2014, Pelaksanaan Pengawasan Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Terhadap Aparatur Pemerintah Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

Asmiarsi, 2014, Pengawasan dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Parigi Moutong

Aulia Rahma (2016) dengan judul penelitian “Pengawasan Camat dalam meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong

Husnawati 2012, Pelaksanaan Pengawasan Camat Terhadap Aparat Pemerintah di Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara. Skripsi Fisip Unismuh Palu.

Fabanyo, 2011. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Di Inspektorat Daerah Kota Tidore Kepulauan, . Unhas, Makassar.

M Rudin, MLF Bakarbesy, F Fadlun, 2024, Strategi Manajemen Pengembangan Usaha. Mikro dan Kecil Olahan Pangan di Kabupaten Morowali Utara Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo.